

ISLAM POLITIK DI INDONESIA
TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL AKSI BELA ISLAM 212
DARI GERAKAN DEMONSTRASI KE GERAKAN
KELEMBAGAAN SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

Gili Argenti¹⁾

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan
H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

ABSTRAK

Aksi Bela Islam 212 memiliki keunikan tersendiri sebagai gerakan sosial. Aksi unjuk rasa berubah menjadi aksi lebih terlembagakan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Aksi Bela Islam 212 menggunakan ideologi Islam sebagai spirit perjuangan dan perlawanan. Sumber daya berupa masjid dan pesantren menjadi sumber daya yang membantu secara maksimal eskalasi partisipan aksi. Proses transformasi gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 ke lembaga sosial, ekonomi dan politik, menandakan telah terjadi perubahan tujuan arah gerakan, tujuan mereka tidak hanya sampai divonis bersalahnya Ahok saja, tetapi mengalami pergeseran tujuan beragam. Tulisan ini merupakan studi literatur yang ingin menjelaskan fenomena Aksi Bela Islam 212, dari gerakan demonstrasi menjadi aksi lebih terlembagakan.

Kata kunci : Aksi Bela Islam 212, Gerakan Sosial dan Transformasi Gerakan.

ABSTRACT

The Islamic Defending 212 Act has its own uniqueness as a social movement. Demonstrations turned into more institutionalized actions in the social, political and economic fields. Islamic Defending Action 212 uses Islamic ideology as a spirit of struggle and resistance. Resources in the form of mosques and pesantren become resources that help maximally escalate participants in the action. The process of transforming social movements into a social, economic and political institution, indicates that there has been a change in the direction of the movement, their objectives not only until Ahok's guilty verdict, but experiencing a shift in diverse objectives. This paper is a literature study that wants to explain the phenomenon of the Islamic Defendant Action 212, from the demonstration movement to the more institutionalized action.

Keywords: Islamic Defending 212 Act, Social movement, and transformation movement

PENDAHULUAN

Gerakan sosial menjadi bagian dari partisipasi politik masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aksi kolektif masyarakat ini biasanya melibatkan kerumunan massa yang terorganisir untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dengan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial, tentu akan memperbesar peluang keberhasilan tuntutan mereka kepada pemerintah.

Dalam sejarah politik Indonesia berbagai peristiwa besar yang terjadi dinegeri ini terjadi karena partisipasi politik masyarakat yang terlembagakan dalam gerakan sosial. Berbagai peristiwa politik spektakuler di negeri ini seperti

peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian disusul dari Orde Baru ke Reformasi peran politik masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial tidak dapat kita nafikan. Mereka seperti mengisi ruang kosong atau kevakuman institusi politik yang seharusnya dimainkan oleh lembaga perwakilan (DPR) dan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuasaan pengontrol jalannya kekuasaan pemerintah.

Pasca kejatuhan Orde Baru publik politik Indonesia banyak disuguhkan dengan berbagai fenomena politik yang menarik seperti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, Otonomi Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak. Beberapa fenomena tersebut mengidentifikasi sistem politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari sistem politik otoriter-totaliter ke demokrasi. Menariknya meskipun penguatan kelembagaan demokrasi sedang terjadi, tidak melunturkan semangat masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktifitas gerakan sosial sebagai bagian dari partisipasi politik. Salah satu gerakan sosial yang menarik perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia, adalah Aksi Bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 atau kita familiar menyebutnya dengan Aksi Bela Islam 212.

Aksi Bela Islam merupakan aksi unjuk rasa terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Ini merupakan gerakan sosial pertama dalam sejarah Indonesia yang bersifat massif kolosal dan berskala nasional. Bahkan peserta aksi yang terlibat mungkin melampaui peserta aksi unjuk rasa ditahun 1966, 1974, 1977/1978, dan terakhir 1998. Selain itu latar belakang peserta aksi sangat plural dari kelompok-kelompok yang disebut Islam garis keras, pengikut ormas Islam *mainstream*, para santri, kalangan selebritis, kaum profesional, anak-anak muda dari perkampungan serta perkotaan, juga tidak ketinggalan ibu-ibu muda sosialita (<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/11/10/ogfkdr319-revolusi-putih>, diakses tanggal 29 Januari 2017).

Menjadikan Aksi Bela Islam 212 sebagai bahan kajian ilmu sosial tentu sangat menarik, setidaknya terdapat beberapa point penting yang menjadi alasan penulis menjadikan Aksi Bela Islam 212 menjadi topik tulisan ini. *Pertama*, Aksi Bela Islam 212 menjadi antitesis gerakan sosial lainnya, yang menempuh jalan

kekerasan dalam memperjuangkan tuntutan, kekerasan seakan menjadi fenomena menonjol dari berbagai gerakan sosial yang menyeruak di media nasional dan Internasional. Aksi Bela Islam 212 ini seakan menjadi setitik oase di gurun pasir. *Kedua*, Aksi Bela Islam 212 dimotori beberapa ulama serta da'i muda dari latar belakang ormas Islam *non-mainstream*, sebuah fenomena baru yang mungkin menunjukkan terjadi pergeseran orientasi keberagamaan umat Islam Indonesia, yang selama ini dilekatkan sebagai umat Islam moderat mengikuti garis kebijakan ormas *mainstream* NU dan Muhammadiyah. *Ketiga*, terjadi transformasi gerakan dari Aksi Bela Islam 212, sebelumnya menempuh gerakan parlemen jalanan ke gerakan lebih terlembagakan ke berbagai institusi sosial dan ekonomi. *Keempat*, Aksi Bela Islam 212 secara kuantitas melibatkan peserta aksi sangat besar, sebuah fenomena baru dalam studi gerakan sosial di Indonesia. *Kelima*, Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 menjadi *prototype* perkembangan teori gerakan sosial.

Sebagai *prototype*, karena biasanya sebuah gerakan sosial akan meredup atau surut apabila terdapat tiga faktor kalau kita merujuk pada teori gerakan sosial, yaitu (1) Gerakan sosial mengalami represifitas sistemik dari rezim yang mengakibatkan meredupnya gerakan, karena rezim berhasil menghancurkan organisasi gerakan sampai keakar-akarnya. (2) Tujuan dari gerakan sosial telah tercapai dengan diakomodirnya tuntutan mereka. (3) Hilangnya seorang pemimpin kharismatis, pertentangan internal dan merosotnya dukungan.

Untuk kasus Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 ini menjadi berbeda, gerakan ini tidak mengalami kehancuran oleh rezim berkuasa, serta tuntutan utama mereka sudah teralisasi di dalam persidangan. Tetapi gerakan ini tidak meredup justru semakin menguat pola gerakannya, bahkan geliat gerakan Aksi Bela Islam ini semakin terinstitusionalisasi dalam lembaga-lembaga sosial, politik dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus tulisan ini :

1. Bagaimana anatomi gerakan sosial (aktor, akar, ideologi, dan sumber daya) dari Aksi Bela Islam 212?

2. Bagaimana proses transformasi gerakan sosial dari Aksi Bela Islam 212 dari aksi demonstrasi menjadi gerakan terlembagakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasan (2012:2-3) mendefinisikan Islam politik sebagai gejala sosial politik diberbagai belahan dunia yang berkait dengan aktifitas sekelompok individu muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakininya bersama. Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial-politik yang melibatkan sekelompok individu muslim yang aktif melakukan gerakan tertentu yang diyakininya. Unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial-politik lain adalah : (1) aktor yang terlibat, (2) aktifisme dan (3) ideologi. Aktor yang terlibat dalam Islam politik, merupakan sekelompok orang beragama Islam, mengikat aktifitas serta keterlibatan individu-individu yang berkhidmat dalam Islam politik. Tetapi identitas keagamaan saja tidaklah cukup untuk menisbatkan sesuatu kepada Islam politik, diperlukan unsur kedua yang penting, yakni aktifisme. Artinya, meskipun ada sekelompok individu yang beragama Islam, gejala Islam politik tidak terjadi sebelum mereka mengaktifkan diri melakukan gerakan tertentu, yaitu gerakan dan aktifitas bernuasa politik yang memiliki spektrum sangat luas, terutama berkait dengan sistem kekuasaan. Terakhir unsur ideologi menjadi inheren dalam Islam politik, karena pertautan yang erat dengan sistem kekuasaan, ideologi berfungsi sebagai penggerak dan landasan pemikiran di belakang aktifitas gerakan yang dikategorikan sebagai Islam politik.

Singh (2010) mendefinisikan gerakan sosial ialah : (1) Mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan, keadilan sosial, mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan budaya mereka. Aksi-aksi kolektif merupakan kenyataan yang esensial dan senantiasa ada dalam gerakan sosial, aksi kolektif menurutnya sebagai usaha bersama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut

bersama, meskipun berhadapan dengan penentangan dan konflik. (2) Memobilisasi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha menyuarkan keluhan melawan pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat. Gerakan sosial juga menurutnya harus dicirikan oleh adanya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh anggotanya.

Sedangkan Klandermans (2005:7-10) menjelaskan gerakan sosial muncul karena terdapat aksi kolektif berupa seperangkat keyakinan dan pemaknaan berorientasi pada tindakan yang memberi inspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan sosial. Terdapat tiga faktor yang memicu gerakan sosial, yaitu (1) Rasa Ketidakadilan, (2) Elemen Identitas dan (3) Faktor Agensi.

Pertama, rasa ketidakadilan yang muncul dari kegusaran moral (*moral indignation*) berhubungan dengan kekecewaan, seperti para karyawan perusahaan yang merasa dikhianati pihak manajemen. Kegusaran moral ini sering kali berhubungan dengan ketidaksetaraan yang tidak memiliki legitimasi, yaitu perlakuan tidak seimbang terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok yang dipersepsikan sebagai sebuah ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan semacam ini menjadi *raison d'être* dari beberapa gerakan sosial utama, seperti gerakan buruh, gerakan hak-hak sipil dan gerakan perempuan (Klandermans, 2005)

Kedua, elemen identitas muncul karena didorong rasa kemarahan yang diekspresikan oleh orang-orang yang menilai ada situasi ketidakadilan disebabkan pihak luar yang harus bertanggungjawab atas situasi yang tidak dikehendaki. Kemarahan ini tergantung pada atribut kausal, yaitu pengidentifikasian siapa pihak yang dipersalahkan atas situasi yang meresahkan dan tidak mengenakan, tetapi untuk dapat memotivasi aksi kolektif, kemarahan itu harus dirasakan bersama. Artinya pengidentifikasian “mereka” (maksudnya pihak elit atau penguasa) yang dianggap bertanggungjawab atas sebuah situasi negatif menyiratkan “kita” sebagai lawannya. Komponen identitas ini tidak hanya menekankan kebersamaan dalam merasakan ketidakpuasan, tetapi komponen identitas harus memantapkan sikap oposisi kelompok terhadap para pelaku penindasan (Klandermans, 2005).

Ketiga, agensi mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi atau kebijakan melalui aksi kolektif, rasa ketidakadilan atau rasa beridentitas mungkin merupakan kondisi yang diperlukan untuk partisipasi dalam gerakan, tetapi merasakan ketidakpuasan bersama dan menemukan penguasa yang dapat dipersalahkan semata-mata tidak cukup dapat mendorong orang untuk melibatkan diri dalam aksi kolektif. Individu-individu harus menjadi yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi mereka, keyakinan semacam itu merupakan syarat bagi kemunculan agen-agen yang memberikan kesan sangat berpengaruh secara politik, yang dibuktikan dengan kesuksesan mereka dimasa lalu atau pengaruh mereka secara potensial (Klandermans, 2005).

Mahasin (1983) menengarai bahwa gerakan sosial lebih banyak diprakasasi oleh golongan menengah, lebih jauh ia mengatakan gerakan sosial yang digerakan oleh masa kelas bawah hanya sebagai mitos. Golongan kelas menengah bisa berupa kelompok studi, perkumpulan mahasiswa, kelompok kohesif, komunitas pedagang dan kaum buruh perkotaan. Kelompok-kelompok kelas menengah tersebut mencoba menjaring konstituen dengan menghimpun para pengikut sebanyak mungkin, karena sebuah gerakan sangat ditentukan oleh basis massa yang ikut terlibat.

Sedangkan Suharko (*Gerakan Sosial Baru di Indonesia* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1, Juli 2006) jenis-jenis gerakan sosial diantaranya : (1) Gerakan protes, gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. (2) Gerakan regresif, gerakan yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Dan (3) Gerakan religius, gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (*supernatural*), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.

Dalam konteks gerakan sosial, ideologi seringkali digunakan sebagai dasar bagi usaha pembebasan manusia, dalam hal ini ideologi memiliki pengertian sebagai sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia

dalam bertingkah laku mencapai tujuan tertentu. Dengan cara menurunkan gagasan-gagasan ideologi menjadi sejumlah kerangka aksi dan aturan-aturan tindakan, sekelompok manusia bertindak membebaskan diri dari sesuatu yang dipersepsikan sebagai kekangan atau penindasan. Ideologi memberi arah bagi gerakan pembebasan, serta menjadi keyakinan bagi kelompok tersebut (Takwin, 2009:5)

Terdapat beberapa sumber daya dari gerakan sosial Islam. *Pertama*, Masjid yang menjadi lembaga utama bagi praktik keagamaan dalam masyarakat-masyarakat muslim, seringkali dimanfaatkan sebagai suatu struktur mobilisasi religio-spasial kelompok Islamis. Dalam stuktur masjid kalangan Islamis menyelenggarakan khutbah, ceramah dan kelompok-kelompok studi untuk menyelenggarakan pesan gerakan, mengorganisasi tindakan kolektif dan merekrut anggota baru. Selaian itu, masjid juga menawarkan jaringan organik dan nasional yang menghubungkan komunitas-komunitas aktifis diberbagai tempat. *Kedua*, LSM-LSM Islam merupakan kumpulan organisasi tingkat menengah yang digunakan, LSM Islam seperti klinik medis, rumah sakit, yayasan-yayasan derma, pusat-pusat budaya dan sekolah-sekolah, telah menyediakan barang dan jasa untuk memperlihatkan bahwa Islam adalah jawaban persoalan-persoalan sehari-hari dalam masyarakat. *Ketiga*, para aktifis Islam juga melakukan mobilisasi melalui struktur asosiasi-asosiasi profesional dan mahasiswa. Dalam masyarakat muslim, asosiasi-asosiasi ini sering kali berfungsi sebagai gelanggang politik alternatif dimana berbagai kontrol atas sumber daya kelembagaan (Wikatoorowicz, 2012:50)

Sedangkan untuk teori perubahan sosial (transformasi sosial) penulis menggunakan Teori Kelompok Strategik dari Evers dan Schiel (dalam Evers dan Gerke, 2015) teori ini memahami bahwa sebuah perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berdasarkan pada perilaku manusia yang dikawal oleh kepentingan dalam mencari keuntungan secara maksimum, selain itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor tindakan sosial berupa cinta atau kebencian serta iri hati atau kagum. Kelompok strategik (Evers dan Gerke, 2015) bukanlah kelompok elit, mereka merupakan masyarakat yang bersatu dalam satu tujuan sama untuk

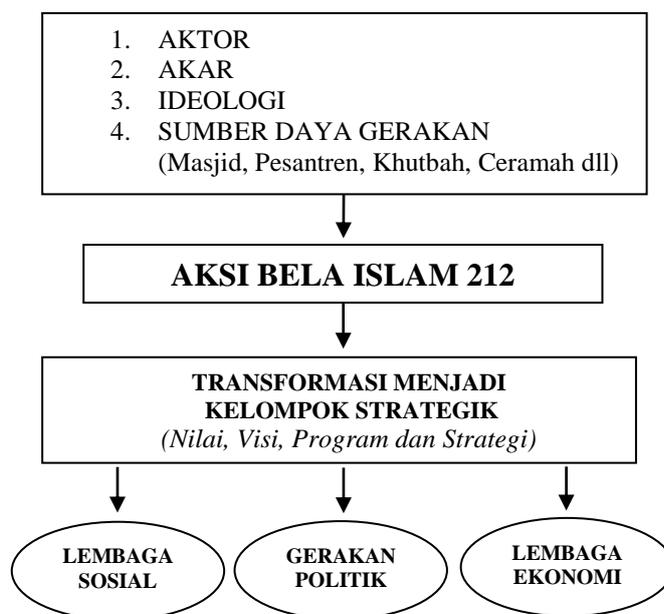
mendapatkan peluang kini atau akan datang, serta memperoleh akses kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Tindakan dari kelompok strategik berupa perubahan institusi yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan struktur sosial, politik dan ekonomi dan institusi yang dapat meningkatkan peluang yang mereka harapkan.

Kelompok strategik (Evers dan Gerke, 2015) tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui tahap pengkondisian, yaitu kesamaan akan peluang hidup, memiliki relasi hubungan yang sama dan nilai yang sama. Mereka dipanggil "strategik", karena mereka mampu membangun strategi mereka sendiri, serta secara aktif menggalakkan gerakan sosial, ekonomi atau politik. Mereka memiliki kecenderungan untuk menyokong pemimpin yang muncul dari kalangan mereka sendiri, atau pemimpin yang dianggap bisa mewakili aspirasi dan memperjuangkan kelompok mereka.

Dalam banyak kasus perubahan sosial, tidak jarang kelompok strategik ini menjadi penguasa baru dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan perubahan dalam struktur kelas sosial di masyarakat. Tujuan kelompok strategik menubuhkan sebuah "struktur" (sistem politik dan ekonomi) yang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kemunculan sistem ekonomi baru dan sistem politik baru, kelompok ini mempunyai peluang yang besar untuk menstrukturisasi sistem politik, mewujudkan corak kesahihan, gaya politik untuk kepentingannya.

Bagan 1 : Alur Berpikir Penulis





Alur berpikir diatas merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, sengaja penulis tidak menggunakan satu kerangka teori, karena dengan menggunakan kerangka teori lebih dari satu penulis berharap mampu memotret secara luas objek kajian penelitian, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

METODE PENELITIAN

Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2014: 4) mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 suhu politik nasional memanas, karena terjadi tiga kali aksi besar yang dilakukan umat Islam Indonesia terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama Islam. Aksi pertama dilakukan pada bulan Oktober 2016 di Balai

Kota, aksi ini tidak begitu mendapat pemberitaan secara luas. Baru kemudian aksi kedua dan ketiga yang menggunakan *tagline* Aksi Bela Islam (ABI) yang dikenal dengan Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212 menjadi peristiwa besar yang menyita perhatian publik Indonesia bahkan dunia, dikarenakan selain aksi diikuti massa yang banyak bahkan diprediksi mencapai jutaan orang juga mendapat porsi pemberitaan yang sangat massif melalui media cetak, elektronik dan sosial.

Menurut Latief (JURNAL MAARIF Vol. 11, No. 2-Desember 2016) Aksi Bela Islam ini memang berbeda dengan gerakan sosial lain yang pernah terjadi di Indonesia, perbedaan ini terletak pada keunikan aksi Bela Islam yang beririsan dengan aspek politik praktis khususnya terkait dengan kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta, khususnya terkait posisi Ahok sebagai gubernur pertahana yang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur untuk periode lima tahun selanjutnya.

Gerakan Aksi Bela Islam ini memang tidak bisa dilepaskan dari setting sosial politik yang melatarbelakanginya yaitu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut Jati (JURNAL MAARIF Vol.12,No.1-Juni 2017), perhelatan pemilu kepala daerah di Jakarta ini telah memunculkan spekulasi bahwa Aksi Bela Islam sebagai sebuah gerakan politik, terlebih beberapa hari menjelang hari H pemilihan, terdapat gerakan politik yang mengatasnamakan “Tamasya Al-Maidah” untuk mengajak serta mempengaruhi preferensi pemilih Jakarta untuk memilih pemimpin muslim.

Sedangkan Burhani (JURNAL MAARIF Vol.12,No.1-Juni 2017) mengaitkan Aksi Bela Islam sebagai persoalan antara “keindonesiaan” dengan “keislaman” seakan-akan identitas keislaman dengan keindonesiaan tidak bisa menyatu. Kasus Pilkada DKI Jakarta telah menjebak kita pada dua sudut ekstrim antara muslim dan nasionalis. Terdapat anggapan kalau kita tidak mendukung Ahok, sepertinya kita tidak mendukung kebhinekaan. Serta sebaliknya kalau kita mendukung Ahok, maka kita akan dikecam sebagai pembela si penista agama, bahkan keimanan dan keislaman kita sejatinya menjadi domain privasi dan otoritas ketuhanan akan dipertanyakan, diragukan serta dihakimi publik.

Peristiwa ini diawali oleh pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 7 September 2016, ketika melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, dalam pidatonya Basuki atau Ahok dinilai terindikasi melakukan penistaan terhadap agama Islam, berikut fragmen pernyataan kontroversial Ahok yang menuai reaksi dari umat Islam Indonesia :

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok” (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses tanggal 28 Agustus 2018).

Pidato Basuki ini kemudian banyak menuai pro dan kontra setelah diunggah oleh Bun Yani di akun facebooknya dengan memberi judul “Penistaan terhadap Agama?”. Tidak lama kemudian Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam, serta menjelaskan ia tidak berniat untuk menghina Islam dan Al-Qur’an, tetapi permintaan maaf Ahok hanya berdampak sangat kecil. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Ahok telah menghina Islam termasuk para ulama.

Terkait pemberian surat keputusan MUI dalam kasus Ahok, menurut pendapat berbagai pihak menandakan telah terjadi perubahan posisi MUI bila dibandingkan ketika masa rezim Orde Baru berkuasa. Surat keputusan MUI ini dinilai sebuah langkah berani yang diambil MUI, karena surat keputusan seakan-akan memperhadapkan MUI dengan pemerintahan, mengingat selama ini sosok Ahok sering dikaitkan kubunya pemerintah.

Posisi MUI sendiri pada masa reformasi ini menurut Ichwan (dalam Bruinessen, 2014:102) memang telah mengalami perubahan peran, sebelumnya sebagai pelayan pemerintah (*khadim al-hukumah*) pada masa Orde Baru menjadi pelayan umat (*khadim al-ummah*) hal ini selaras dengan konsep dasar dari agenda reformasi. Posisi MUI saat ini memang memosisikan dirinya untuk membela

kepentingan dan aspirasi umat Islam, bahkan menurut Ma'ruf Amin MUI memperkenalkan pendekatan baru dengan jargon “melunakan yang keras dan mengeraskan yang lunak”, sehingga perubahan peran ini telah merubah pandangan MUI yang sebelumnya senantiasa mewakili penafsiran ortodoksi Islam moderat, pada dekade terakhir menunjukkan pergeseran menjadi lebih puritan.

Dalam risetnya Ichwan (dalam Bruinessen, 2014) juga menjelaskan beberapa produk MUI yang menandakan pergeseran tersebut, diantaranya *Pertama*, sebelum Pemilu 1999, MUI mengeluarkan tiga tausiyah (pada 29 April, 20 Mei dan 1 Juni 1999). Tausiyah itu berturut-turut berisi seruan kepada umat Islam Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum damai, seruan untuk menghormati pilihan partai politik Islam. *Kedua*, pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa menyatakan haramnya perbankan konvensional yang berbasis bunga. Memang pada tahun 2000, MUI mengeluarkan keputusan perbankan konvensional diperbolehkan dengan pertimbangan situasi masih darurat. Namun, pada tahun 2003 telah berdiri sejumlah bank syariah, sehingga MUI menganggap perbankan konvensional tidak diperlukan lagi. *Ketiga*, MUI mengeluarkan fatwa terkait polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan mengeluarkan fatwa No. 287/2001, dalam fatwanya tersebut MUI mendesak semua penyelenggara negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh, bahkan harus disertai sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, supaya pelaku jera serta orang belum melakukan takut untuk melakukannya. *Keempat*, MUI mengeluarkan fatwa anti liberal, pluralisme dan sekulerisme tahun 2005, adapun alasan MUI mengeluarkan fatwa ini untuk melindungi umat Islam Indonesia dari pengaruh ideologi serta pemikiran berbahaya yang mengancam akidah Islamiah, bahkan tidak hanya mengeluarkan fatwa, para tokoh muslim liberal dikeluarkan dari kepengurusan MUI pusat sampai ke daerah.

Puncak dari kekecewaan umat Islam terhadap kasus Ahok dan dukungan terhadap surat keputusan MUI ialah berdirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok telah merubah lanskap Pilkada Serentak 2017 yang sebenarnya diikuti 101

daerah, karena kasus penistaan agama ini gaung daerah lain akhirnya tenggelam dibawah gemuruh politik yang mewarnai Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Sholikin (Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10, No. 1 Tahun 2018) Aksi Bela Islam merupakan sebuah gerakan protes berbasis solidaritas yang direkatkan oleh isu tentang penistaan agama. Banyak tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam Aksi Bela Islam, mereka ini memiliki jamaah dalam jumlah besar, namun keunikannya tokoh-tokoh Islam tersebut memiliki pola dakwah yang berbeda, bahkan satu sama lain senantiasa membawa topik-topik ceramah yang tidak sama. Seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pimpinan Pesantren Daarut Tauhid di Bandung, Muhammad Arifin Ilham pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Habib Rizieq Shihab Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Bachtiar Nasir Ketua GNPf juga Sekretaris Jendral 1 Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), KH. Ma'ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh dari ormas Islam lain yang memiliki banyak jamaah.

Sementara itu organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berusaha menjaga jarak dengan Aksi Bela Islam, kedua organisasi Islam ini tidak memberikan pernyataan yang tegas terhadap Aksi Bela Islam. Seperti sikap resmi yang dikeluarkan PP Muhammadiyah yang ditandatangani Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti, berikut penulis kutipkan dibawah ini :

“Muhammadiyah secara kelembagaan tidak ikut serta dan terlibat dalam aksi unjuk rasa 4 November, adapun warga Muhammadiyah memiliki hak demokrasi untuk demo selaras dengan misi dakwah amar makruf nahi munkar yang pelaksanaannya harus sejalan dengan Khittah dan kepribadian. Karena itu bagi warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi demonstrasi harus memahami sepenuhnya bahwa keikutsertaannya merupakan sikap pribadi sehingga tidak diperkenankan membawa atribut Muhammadiyah, terutama bendera, menggunakan fasilitas dan dana persyarikatan untuk kepentingan demonstrasi” (Jurnal Maarif Institute, Vol 11, No. 2-Desember 2016)

Berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dua ormas Islam lain yaitu Persatuan Umat Islam (PUI) dan Persatuan Islam (Persis) terang-terangan mendorong dan memobilisasi para anggotanya untuk terlibat dalam Aksi Bela Islam. Menurut Muhammad (Jurnal Analisa, Volume XVI, Nomor 2, Desember 2016) keterlibatan PUI dan Persis dalam Aksi Bela Islam, karena kedua

ormas ini memiliki karakter yang belum banyak berubah sejak dua ormas ini didirikan, yaitu membela Islam dengan cara melawan orang-orang yang dicurigai telah menodai kesucian Islam. Hal ini bisa dilihat dari sejarah pendirian Persis dengan tokohnya A. Hassan yang suka berdebat dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan ajaran Islam yang diyakini benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk perdebatan dengan Soekarno, tokoh yang disimbolkan dari kalangan nasionalis sekuler. Begitu juga dengan Kiai Sanusi yang menjadi tokoh utama PUI yang seringkali kontra dengan tokoh agama lain untuk memperjuangkan Islam yang benar. Jadi tidak heran kalau banyak anggota serta kader Persis dan PUI berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam.

Selain Persis dan PUI tentu kehadiran Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam tidak bisa kita nafikan perannya, mengingat sejak jauh-jauh hari FPI sudah berkonfrontasi dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang dinilai FPI sudah merugikan kepentingan umat Islam Jakarta.

Menurut Masithoh (JOM FISIP, Vol 5, No. 1-April 2018) Aksi Bela Islam memang dikoordinasi oleh FPI dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Front Pembela Islam (FPI) menurutnya merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting dimasa reformasi, ormas Islam ini sangat tegas dalam menegakan *Amar Ma'ruf Nahimunkar* asas FPI sendiri ialah *Ahlussunah wal Jamaah* (Aswaja). Organisasi ini dengan cepat dikenal masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, hal ini berhubungan erat dengan aksi nyata mereka dalam merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya sebagai sarang kemaksiatan seperti klub malam, diskotik, kafe dan kasino. Aksi mereka ini kerap kali dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan.

Selain mengikutsertakan FPI, Aksi Bela Islam 212 juga melibatkan ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menariknya meski dalam tataran organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak melibatkan diri dalam Aksi Bela Islam 212, tetapi banyak anggotanya yang berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka yang melibatkan diri sebagai peserta aksi datang juga dari kalangan mahasiswa baik dari universitas sekuler dan universitas Islam, santri dari

pesantren-pesantren tradisional dan modern. Berikut penuturan Mulyadi P. Tamsir (Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018).

“Aksi Bela Islam jangan dipelintir dan dihubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta, kalau masalah Pilkada apa urusannya orang Jawa Timur dan Sumatra datang ke Jakarta ikut aksi, kita minta kepada Presiden dan Kapolri untuk secepatnya proses Ahok karena penistaan agama, maka PB HMI mengambil sikap ikut berperan serta mengambil garda terdepan dalam barisan Aksi Bela Islam” (dalam, Doli dan Syahputra, 2017).

Dalam Aksi Bela Islam HMI menurunkan peserta aksi sebesar 1.500 orang dari unsur Pengurus Besar HMI, Pengurus Badko HMI dan cabang yang ada disekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten.

Begitu juga dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menurut penuturan Kartika Nur Rakhman (Ketua Umum PP KAMMI) kader KAMMI yang berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam sekitar ribuan orang.

“Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi saksi dan pelaku sejarah dalam aksi akbar 212, kader KAMMI dengan jilbab putih dan gamis hitam sudah menunggu di Bunderan Hotel Indonesia semenjak waktu Dhuha, sedangkan ratusan kader lain menginap di Masjid Sunda Kelapa sejak dini hari. Sedangkan ratusan kader dari Bogor dan Depok memilih aksi longmarch sejak 1 Desember” (dalam, Doli dan Syahputra, 2017).

Dari data diatas yang penulis peroleh, bahwa para peserta Aksi Bela Islam 212 sangat beragam, tidak dari satu komunitas Islam saja, tetapi sudah lintas komunitas yang terkadang berbeda metode berdakwah antara satu komunitas dengan komunitas lain, mereka bergerak bersama-sama karena didasari oleh spirit *Ukhuwan Islamiyah*. Sedangkan, tujuan para peserta Aksi Bela Islam 212 bagi penulis berdasarkan beberapa data yang terkumpul menunjukkan pola sama, para aktor gerakan sosial yang melibatkan diri dalam aksi demonstrasi 212 menginginkan adanya keadilan ditunjukkan pemerintah dengan menangkap dan mengadili Ahok.

Kemunculan Aksi Bela Islam 212 dilatarbelakangi kekecewaan umat Islam Indonesia atas tidak diindahkannya tuntutan untuk menangkap Ahok atas perbuatannya. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) juga mewacanakan kepada publik : (1) Tafsir GNPF-MUI bahwa Ahok telah menghina ulama (pimpinan umat Islam) karena kalimatnya mengindikasikan pesan seorang ulama itu adalah pembohong. (2) Tafsir GNPF-MUI bahwa Ahok telah menista

Al-Qur'an, dengan mengindikasikan ulama yang menggunakan Ayat 51 Surat Al-Maidah ditunjukkan untuk kepentingan "menipu" umat Islam.

Awalnya menurut Sulistyio (2017:52), memang kasus penistaan agama ini menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat, ada yang masih mempertanyakan, apakah hal tersebut termasuk penistaan agama atau bukan. Tetapi, setelah MUI mengeluarkan surat keputusan bahwa kasus Ahok termasuk dalam lingkaran penistaan agama, sontak banyak pihak kemudian melaporkan kasus ini kepada para penegak hukum agar secepatnya dapat diproses secara hukum. Namun, akibat lambatnya penegakan hukum dari pemerintah, akhirnya berbagai unjuk rasa digelar umat Islam yang puncaknya Aksi Bela Islam 212.

Satu tesis dari Aksi Bela Islam 212 dapat diajukan disini, bahwa spirit berislam telah menjadi ideologi kolektif yang menjadi simbol perlawanan dan identitas para peserta aksi. Aksi Bela Islam menandakan kekuatan publik dan abesennya hegemoni negara, walaupun sempat ada upaya-upaya negara untuk membatalkan aksi ini, namun resistensi masyarakat justru semakin banyak mengundani massa. Lautan manusia yang demikian besar sebenarnya rentan terhadap aksi-aksi anarkis, tetapi umat Islam Indonesia mampu menjawabnya dengan aksi kolosal super damai. Ini menjadi parameter keberhasilan demokratisasi kelas menengah muslim yang semakin otonom serta diharapkan menjadi mediator antara negara dengan masyarakat.

Menurut Nugraha (Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung, Volume IV No.11 September -Desember 2010) Masjid adalah institusi yang inheren dengan masyarakat Islam. Keberadaannya dapat menjadi ciri bahwa disitu tinggal komunitas muslim. Masjid pada umumnya terlepas dari keragaman bentuk dan ukuran besar atau kecilnya menjadi kebutuhan yang mutlak bagi umat Islam sebagai tempat untuk menemukan kembali suasana religius yang menjadi simbol keterikatan warga muslim tersebut satu sama lainnya.

Dalam Aksi Bela Islam fungsi masjid sangatlah penting, selain sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat, juga tempat konsolidasi dan titik berkumpul peserta sebelum melakukan aksi. Selain di Masjid Istiqlal peserta Aksi Bela Islam 212 bermalam di beberapa masjid di Jakarta, bahkan sebagian masjid menyediakan

berbagai keperluan untuk para peserta aksi, diantaranya menyediakan makanan dan minuman. Sumber daya berupa masjid sangat membantu Aksi Bela Islam 212 dalam memperbesar partisipasi peserta. Sumber daya lain yang sumbangsuhnya cukup besar dalam memperbesar Aksi Bela Islam 212 adalah lembaga pesantren. Peristiwa penting keterlibatan pesantren dalam Aksi Bela Islam 212 ialah aksi *long march* yang dilakukan para santri Ciamis menuju Jakarta, peserta aksi jalan kaki ini ialah para santri, motivasi mereka melakukan *long march* ingin menunjukkan kekuatan Islam Indonesia yang tidak menyerah atas dominasi negara, serta mampu menginspirasi wilayah lain untuk bersama-sama bergerak menuju Jakarta.

Selain berpartisipasi dalam aksi *long march* para santri dari pesantren juga banyak yang menjadi relawan kebersihan setelah aksi berakhir, tercatat ribuan santri berpartisipasi dalam aksi ini. Santri yang menjadi relawan kebersihan ini berkeliling untuk mengambil sampah dari setiap peserta sekaligus memunguti jika ada sampah yang tercecer. Aksi bersih-bersih yang dilakukan para santri se usai aksi ini banyak menuai pujian dari masyarakat luas, mereka kagum akan kekompakan dan soliditas santri dalam menyukseskan Aksi Bela Islam 212.

Fenomena menarik pasca Aksi Bela Islam 212 ialah terbentuknya beberapa gerakan keagamaan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi, transformasi sosial ini diluar prediksi banyak pihak, mengingat tuntutan utama Aksi Bela Islam 212 sudah terakomodir, dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Karena berdasarkan teori gerakan sosial seharusnya Aksi Bela Islam 212 surut atau berakhir, tidak bertransformasi menjadi gerakan sosial lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, terjadi transformasi dari Aksi Bela Islam 212 menjadi gerakan berupa kelembagaan sosial, politik dan ekonomi, diantaranya : *Pertama*, gerakan ekonomi berupa pendirian Koperasi Syariah 212 dan 212 Mart. *Kedua*, gerakan shalat subuh berjamaah yang dilakukan masif di beberapa daerah. *Ketiga*, gerakan bersifat politik dalam bentuk Presidium Alumni (PA) 212 yang banyak melibatkan diri dalam gerakan politik praktis.

Koperasi Syariah 212 adalah Koperasi Primer Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi Bela Islam 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

Koperasi Syariah 212 didirikan tanggal 6 Januari 2017, di Ruang Al-Hambra, Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Saat itu berkumpul tokoh-tokoh umat, seperti Kyai Ma'ruf Amin, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad M. Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustad Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan masih banyak tokoh umat lainnya. Koperasi Syariah 212 mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 19 Januari 2017 (<https://koperasisyariah212.co.id/profil-koperasi-syariah-212/>, diakses 23 Agustus 2018).

Salah satu produk dari Kopersi Syariah 212 adalah 212 Mart, Koperasi Syariah 212 telah menginisiasi 212 Mart, minimarket Islami dengan konsep *sharing economy* (ekonomi berbagi). Konsep yang berbeda dengan minimarket yang sudah ada sebelumnya. Dalam konsep ekonomi berbagi itu, jaringan ritel 212 Mart dimiliki oleh umat, dikelola oleh umat, dan didirikan untuk umat. Gerai pertama didirikan pada 12 Mei 2017, di Ruko Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat dengan dana awal sekira Rp300 jutaan yang merupakan patungan dari warga, sampai hari ini, telah 174 gerai dibuka dan terus bertambah (<https://koperasisyariah212.co.id/cari-212mart>, diakses 27 Agustus 2018).

Menurut penulis memang suasana gerai-gerai Mart 212 sangat ideologis, penulis pernah masuk ke dua gerai di Kota Karawang, dipintu masuk sudah tercantum, bahwa Mart 212 tidak menjual rokok dan minuman beralkohol, serta toko akan tutup sementara disaat waktu sholat lima waktu. Bahkan, ketika kita berbelanja ke dalamnya kita akan disambut lantunan murotal Al-Qur'an. Gerai Mart 212 mengklaim memiliki 3.015 item produk yang siap dijual ke masyarakat. Gerai Mart 212 mengusung moto Amanah, Berjamaah dan Izzah menjadi

branding untuk merebut pasar pembeli terutama umat Islam yang memang menjadi target potensial.

Sedangkan Gerakan Indonesia Shalat Shubuh Berjamaah dideklarasikan pada peringatan satu tahun Aksi Bela Islam 212 atau publik Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Reuni Alumni Aksi Bela Islam 212. Padahal menurut penulis gerakan shalat subuh berjamaah ini sudah lama dideklarasikan bahkan jauh-jauh hari sebelum Reuni 212. Dalam Reuni 212 deklarasi shalat subuh berjamaah dibacakan oleh Muhammad Al Khatthath.

Gerakan shalat shubuh berjamaah menurut penulis menjadi salah satu cara menjaga spirit Aksi Bela Islam 212, para aktor gerakan sosial ini berusaha untuk terus menjaga semangat serta militansi massa aksi bela Islam tersebut. Terbukti, ajakan shalat shubuh berjamaah ini mendapatkan respon positif dari umat Islam di Indonesia. Bahkan, di beberapa kota besar perhelatan shalat subuh berjamaah digelar secara massif. Inti dari Gerakan Indonesia Shalat Shubuh Berjamaah ini menurut penulis, agar umat Islam menghidupkan masjid sebagai pusat kajian dan diskusi agar lokomotif dakwah bagi umat Islam terus bergerak. Ini juga sebenarnya yang menjadi tujuan dari Alumni 212. Menjadikan Masjid sebagai pusat dari kegiatan dan aktifitas keumatan, termasuk mendiskusikan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan.

Sedangkan dalam ranah politik, transformasi Aksi Bela Islam 212 berwujud gerakan politik praktis. Para partisipan gerakan sosial ini mendirikan Persaudaraan Alumni (PA) 212, Presidium 212 dan Garda 212. Penegasan bahwa Aksi Bela Islam 212 bermuatan politik disampaikan oleh Pembina Presidium Alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- MUI, Kapitra Ampera. Gerakan Aksi Bela Islam 212 tujuannya mengkonsolidasikan umat Islam, sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu maupun pilpres untuk memilih pemimpin yang berkualitas memimpin. Dan Aksi Bela Islam 212 merupakan politik umat Islam, untuk berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres

(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>, diakses 13 November 2018).

Pendapat bahwa Aksi Bela Islam 212 bermuatan politik juga disampaikan Qasim Mathar (Pengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), menurutnya agenda mereka sebenarnya sudah selesai. Kalau agenda Aksi Bela Islam 212 tujuan utamanya hanya menjatuhkan Ahok, memberhentikan Ahok sebagai gubernur maka sudah tercapai. Kalau mereka sekarang meneruskan dengan aksi-aksi unjuk rasa dan terus berkelanjutan. Maka Aksi Bela Islam 212 sudah menjadi gerakan politik, bukan hanya gerakan keagamaan semata (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, diakses 13 November 2018).

Pasca Aksi Bela Islam 212, para penggagasnya kemudian membentuk Presidium Alumni 212, yang diketuai Slamet Maarif (juru bicara Front Pembela Islam). Namun, pada Maret 2018, gerakan ini berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Selain PA 212, penggerak Aksi Bela Islam ini membentuk Gerakan Shalat Subuh Berjamaah (GISS), tujuan dibentuknya GISS adalah "berdakwah lewat jemaah salat subuh". Menariknya meski menolak dianggap sebagai gerakan politik, akan tetapi GISS pernah dideklarasikan oleh tokoh-tokoh nasional yang juga sebagai pengurus partai. Deklarasi gerakan ini dihadiri oleh Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Prabowo hadir dalam deklarasi GISS di Masjid Kristal Khadija di Yogyakarta dan Masjid Al-Hijri II, Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Jawa Barat. Sementara Sandiaga menghadiri deklarasi GISS di Masjid Al Ittihad Tebet, Jakarta Selatan, dan Masjid Al-Makmuriyah Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. (<https://tirto.id/agenda-politik-dibalik-gnpf-ulama-amp-alumni>, diakses tanggal 25 November 2016)

Puncak dari gerakakan para alumni 212 ini adalah pada reuni 212 yang dilaksanakan pada tangga 2 Desember 2018, aksi ini dimotori oleh PA 212, dalam aksinya tersebut, PA 212 menjelaskan Reuni 212 yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta tidak bermuatan politik. PA 212 akan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantau dan mengambil tindakan jika ditemukan aksi politis dalam

Reuni 212. PA 212 telah mengeluarkan imbauan kepada para peserta aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam Reuni 212. Bahkan, PA 212 hanya akan membolehkan peserta aksi untuk menggunakan baju putih saat datang ke Reuni 212. Atribut yang dibolehkan untuk dibawa peserta aksi, yakni bendera Indonesia dan bendera bertuliskan kalimat tauhid. Segala atribut lainnya, apalagi yang berkaitan dengan partai politik dan kandidat Pilpres 2019 tertentu akan dilarang (<https://katadata.co.id/berita/2018/12/01/pa-212-minta-bawaslu-tindak-tegas-aksi-politis-di-reuni-212>, diakses 3 Desember 2018).

Dari beberapa data diatas menurut penulis telah terjadi perubahan format gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 dari aksi demonstrasi ke institusi kelembagaan ekonomi, sosial dan politik. Berubahnya gerakan sosial menjadi kelompok strategik ini, menandakan telah terjadi perubahan tujuan arah gerakan, tujuan mereka tidak hanya sampai divonis bersalahnya Ahok saja. Tetapi mengalami pergeseran tujuan, mereka sekarang ingin mewujudkan struktur sosial, politik dan ekonomi, dimana mereka dapat mengakses dan menjadikan pemimpin dari kalangan mereka.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, bisa penulis simpulkan simpulkan penelitian tentang Aksi Bela Islam 212. ISLAM POLITIK DI INDONESIA (Studi Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 Dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi) diantaranya :

Pertama, Aktor gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 bukan dari satu komunitas Islam tunggal, tetapi berasal dari beragam kelompok Islam di Indonesia. Meskipun dalam praksisnya terdapat beberapa ormas Islam secara terang-terangan menghimbau anggotanya terlibat langsung dalam Aksi Bela Islam 212. *Kedua*, Akar dari gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 merupakan kekecewaan umat Islam Indonesia, atas berlarut-larutnya kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok.. *Ketiga*, Ideologi Aksi Bela Islam 212 menggunakan sentimen Islam sebagai spirit perjuangan dan perlawanan. *Keempat*, Sumber daya berupa masjid dan pesantren menjadi sumber daya yang membantu secara maksimal eskalasi partisipasi aksi. *Kelima*, Proses transformasi gerakan sosial

Aksi Bela Islam 212 ke lembaga sosial, ekonomi dan politik, menandakan telah terjadi perubahan tujuan arah gerakan, tujuan mereka tidak hanya sampai divonis bersalahnya Ahok saja. Tetapi mengalami pergeseran tujuan yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bruinessen, Martin Van. (2014) *Conservative Trun : Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung : Mizan.
- Hasan, Noorhaidi (2013). *Islam Politik Di Dunia Kontemporer : Konsep, Genenalogi Dan Teori*. Yogyakarta : Suka Press.
- Kurnia, Ahmad Doli dan Iswandi Syahputra. (2017). *Aksi Bela Islam 212 : Gerakan Hati Kekuatan Bangsa*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Klandermans, Bert. (2005). *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singh, Rajendra (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta : Resit Book.
- Sulistiyono, M. Dan. (2017), *Kesaksian Peserta Aksi 411 dan 212 : Mengetuk Pintu Langit*. Jakarta : Visi Media.
- Sukmana (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing.
- Takwin, Bagus. (2009). *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Wiktorowicz, Q. (2012). *Gerakan Sosial Islam : Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Penerbit Gading Publishing dan Paramadina.

Jurnal

- Ahnaf, M. *Aksi Bela Islam, ” Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia* (JURNAL MAARIF, Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).
- Burhani, Ahmad Najib. *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan* (JURNAL MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).
- Burhani, Ahmad Najib, *Menegosiasikan KeIndonesiaan dan KeIslaman*. (JURNAL MAARIF Vol. 12, No. 1 — Juni 2017).
- Gerke, S dan Evers, H. *Teori Transformasi Sosial*. ([www.researchgate.net/publication, 2015](http://www.researchgate.net/publication/2015)).

Latief, Hilman, *Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca Aksi Bela Islam 2016*. (JURNAL MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).

Suharko, *Gerakan Sosial Baru di Indonesia* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1).

Sholikin, Ahmad, *Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III* (Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10, No.1 Tahun 2018).

Jati, Wasisto Raharjo, *Dari Umat Menuju Ummah : Melacak Akar Populisme Kelas Menengah Muslim Indonesia*. (JURNAL MAARIF Vol. 12, No. 1 — Juni 2017).

Masithoh, Dewi. *Pemaknaan Jihad Bagi Anggota FPI Riau Dalam Aksi Super Damai 212 Di Jakarta*. (JOM FISIP Vol. 5, No. 1-April 2018).

Muhammad, Wildan Imaduddin, *Ormas Islam Di Jawa Barat dan Pergerakannya : Studi Kasus Persis dan PUI*. (Jurnal Analisa, Volume XVI, Nomor 2, Desember 2016)

Nugraha , Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung, Volume IV No.11 September - Desember 2010)

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses tanggal 28 Agustus 2018

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, diakses 13 November 2018

<http://koperasisyariah212.co.id/212-mart-menggema-di-dunia>, diakses 22 November 2018.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>, diakses 13 November 2018

<https://tirto.id/agenda-politik-di-balik-gnpf-ulama-amp-alumni>, diakses tanggal 25 November 2016

(<https://katadata.co.id/berita/2018/12/01/pa-212-minta-bawaslu-tindak-tegas-aksi-politis-di-reuni-212>, diakses 3 Desember 2018).